

Evaluasi Program Keluarga Harapan Pada Sektor Pendidikan (Studi Pada Sekolah SMPN 1 Adonara, Desa Sagu Kabupaten Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Rohmania Mustarif¹⁾, Ika Devy Pramudiana²⁾, Eny Haryati³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: rmustarif@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fesdik) yang tersedia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan di Desa Sagu serta untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan terhadap bidang pendidikan di Desa Sagu. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek peneliti adalah pihak Pemerintah Desa Sagu, pihak pendidikan SMPN 1 Adonara di Desa Sagu, dan pihak penerima program yaitu Desa Sagu. Data yang diperoleh melalui data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui dokumen. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan melalui efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, sudah terlaksanakan dengan baik akan tetapi masih ada yang belum sesuai dengan program tersebut. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ini adalah tingginya partisipasi pemerintah Desa Sagu serta masyarakatnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban pembayaran sekolah dan akibat kebutuhan orang tua.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Program Keluarga Harapan, Sektor Pendidikan

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is an initiative designed to accelerate efforts to combat poverty. PKH provides access for poor families, particularly pregnant women and children, to utilize various health services (Faskes) and educational facilities (Fesdik) available in Indonesia. This research aims to evaluate the Family Hope Program (PKH) in the education sector in Sagu Village and to identify the supporting and hindering factors of the Family Hope Program in relation to education in Sagu Village. The study employs a qualitative descriptive method, with subjects including the Sagu Village Government, the educational institution SMPN 1 Adonara in Sagu Village, and the program beneficiaries in Sagu Village. Data is collected through primary sources, specifically interviews, and secondary sources through documents. This research utilizes evaluation theory according to William N. Dunn. The results indicate that the Family Hope Program (PKH) in the education sector is implemented effectively in terms of efficiency, sufficiency, equity, and responsiveness; however, there are still aspects that do not align with the program's objectives. Supporting factors in this management include high participation from the Sagu Village government and its community. Conversely, hindering factors include a lack of awareness among the community regarding the obligation to pay for education and the impact of parental needs.

Keywords: Program Evaluation, Family Hope Program, Education Sector

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan kemiskinan dan pendidikan masih menjadi tantangan yang serius di Indonesia serta perlu untuk segera

diselesaikan. Belum diketahui pendekatan mana yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, pemerintah selalu memprioritaskan masalah ini dan mencari solusi

cepat. Wilayah dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung yang tidak merata menjadi penyebab utama permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia, sehingga penyelesaiannya menjadi tantangan.

Penyebab kemiskinan di Indonesia bermacam-macam mulai dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja, kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, dan distribusi pendapatan yang berbeda antara satu daerah dan lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia per September 2020, meningkat menjadi 2 digit, yaitu dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19%. Dari segi jumlah juga meningkat, dari 24,79 juta jiwa pada September 2019 menjadi 27,55 juta. Berdasarkan tempat tinggal, tingkat kemiskinan berada di wilayah perdesaan sebanyak 13,2%, meningkat dari September 2019 yang sebesar 12,6%. Sementara di wilayah perkotaan sebesar 7,88% meningkat dari September 2020 yang sebesar 6,56%.

Data statistik diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih tergolong sangat tinggi sehingga hal ini masih menjadi masalah yang harus diatasi karena merupakan persoalan yang serius. Pemerintah selalu dituntut untuk mencari jalan keluar yang tepat sehingga dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Bagaimanapun juga kemajuan suatu bangsa dilihat juga dari tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Selain masalah kemiskinan yang masih belum bisa terselesaikan, pemerintah Indonesia juga belum bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan baik dan maju hal ini dapat dilihat dari kurikulum pendidikan yang terus berubah serta sarana pendidikan yang belum memadai untuk semua daerah. Ketika kita melihat fenomena saat ini pemerintah terkesan bersikap acuh dan berdalih bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik dibuktikan dengan banyaknya pelajar Indonesia yang mampu meraih prestasi dalam perlombaan tingkat nasional maupun

internasional. Sebenarnya hal ini tidaklah salah, melainkan pemerintah perlu memperhatikan adanya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan anak putus sekolah di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai program yang berlaku secara nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain-lain guna untuk membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun belum ada program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan yang benar-benar bisa dianggap berhasil, dikarenakan banyaknya oknum tidak bertanggung jawab melainkan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian menjadi faktor utama dari kegagalan program-program anti kemiskinan dan kurangnya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan tersebut ditujukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata sesuai yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.

Ada beberapa desa di kecamatan adonara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM (*demand*) maupun sisi pelayanan (*supply*). Pada sisi RTSM, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya. Banyak keluhan masyarakat atas macetnya penyaluran PKH sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya bidang pendidikan. Keluhan tersebut sering ditemukan bahwa anak-anak dari golongan PKH telat bahkan tidak memperhatikan pembayaran sekolah. Ketidaklancaran pencairan PKH berdampak pada telatnya pembayaran sekolah.

Sementara akses RTSM terhadap pendidikan adalah belum tersedianya pelayanan dan pendidikan yang terjangkau oleh RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara tempat tinggal dan

lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan. Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM menyekolahkan anak-anaknya akan membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan keluarga miskin, dimanapun mereka berada.

Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Menurut data BPS masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak berada dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem persekolahan harus ditingkatkan (Rusydi, 2017). Sebagian besar dari mereka yang pada usia sekolah tidak berada dalam sistem persekolahan biasanya mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar.

Penelitian ini dibuat berdasarkan fenomena bahwa banyak sekali ditemukan permasalahan-permasalahan terkait dari PKH, dimulai dari bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan juga masyarakat yang tidak dapat memandirikan diri sendiri. PKH yang ditujukan untuk masyarakat miskin ini banyak sekali yang tidak sesuai penempatannya, ada beberapa masyarakat di Desa Sagu yang sebenarnya berkecukupan secara finansial tetapi malah mendapatkan bantuan PKH. Masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan dirinya sebagai masyarakat miskin kemudian ketika hal ini diketahui oleh pendamping lalu kemudian ditawarkan untuk pemberhentian, banyak masyarakat yang melakukan protes dan menolak untuk diberhentikan sebagai penerima manfaat PKH dan mengklaim dirinya sebagai masyarakat miskin.

Selain itu masyarakat yang menerima PKH ini Banyak keluhan terkait macetnya penyaluran PKH sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya bidang pendidikan. Banyak anak sekolah tingkat SD/MIs, SMP/MTs, dan SMA/MA yang sering ditemukan keluhan sekolah yang mengatakan anak-anak dari golongan PKH telat bahkan tidak memperhatikan pembayaran sekolah padahal bagian dari PKH sebagian untuk pendidikan. Hal ini akan menciptakan permasalahan baru apabila terus berlanjut dengan ketidak lancar pencairan atau kemacetan penyaluran PKH, dan secara tidak langsung tingkat pendidikan (anak putus sekolah) di Desa Sagu semakin tinggi.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa ada masalah mengenai Program PKH. Dari keluhan masyarakat tersebut kita dapat melihat bagaimana penyaluran dan ketepatan waktu pencairan PKH untuk kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Pada Sektor Pendidikan (Studi Pada Sekolah SMPN 1 Adonara, Desa Sagu Kabupaten Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan

Pada dasarnya konsep kebijakan sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sebagaimana menurut Thomas R. Dye dalam (Rushananto, 2014) menjelaskan bahwa “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).

Selain itu menurut James E. Anderson mengemukakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental*

bodies and officials”. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah) (Yuca, 2022). Hal ini cenderung mengacu pada persoalan teknis dan administratif saja. Oleh karena itu Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Anderson menjelaskan lebih lanjut bahwa ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain meliputi:

- a) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

Setelah mencermati beberapa definisi di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik adalah:

- a) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.

- c) Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pengambilan kebijakan publik merupakan suatu hal yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Hal ini juga sesuai dengan pandangan beberapa pakar politik yang tertarik mempelajari kebijakan publik yang membagi proses perumusan kebijakan publik menjadi beberapa tahapan. Jadi tujuan dari pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Berikut Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip (Wahab, 2016) adalah sebagai berikut:

a) Tahap Penetapan Agenda

Masalah-masalah publik dibawa ke perhatian para pejabat yang dipilih dan ditunjuk. Sebelumnya, hal ini diperjuangkan terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, sejumlah topik masuk ke dalam agenda perumus kebijakan. Pada titik ini, beberapa masalah mungkin diabaikan sama sekali sementara masalah lainnya diputuskan untuk menjadi topik pembicaraan utama. Masalah-masalah lain juga dapat diabaikan untuk jangka waktu yang lama karena sebab-sebab tertentu.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives or policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk

memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah banyak pertimbangan di antara direktur lembaga, mayoritas legislatif, atau keputusan pengadilan, salah satu dari banyak pilihan kebijakan yang diajukan oleh perumus kebijakan pada akhirnya diterima.

d) Tahapan Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan bertahan dalam arsip kelompok yang memiliki hak istimewa jika program tersebut tidak dilaksanakan, yaitu jika program tersebut tidak dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau badan administratif di tingkat yang lebih rendah. Divisi administratif yang telah memberikan dana dan personel melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain sepanjang tahap implementasi ini. Para pelaksana kebijakan mungkin mendukung penerapan kebijakan tertentu namun menentang penerapan kebijakan lainnya.

e) Fase Evaluasi Kebijakan

Pada fase ini, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan akan diperiksa atau dievaluasi untuk menentukan sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan dampak yang diinginkan yakni untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, ditetapkanlah pengukuran atau kriteria yang menjadi landasan untuk menentukan apakah kebijakan publik yang diambil telah memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan.

3. Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya tahapan akhir dalam sebuah proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan seringkali diartikan sebagai upaya untuk menilai apakah hasil berbagai program dari suatu kebijakan

tersebut telah sesuai dengan problema yang ada dalam masyarakat.

Hasil evaluasi dapat memberikan wawasan baru atau menunjukkan kesalahan pada tahap awal perencanaan atau desain. Sebagai hasilnya, kita mungkin berargumentasi bahwa rancangan suatu proyek atau program adalah sebuah tebakan heuristik atau berdasarkan informasi. Ini merupakan dugaan atau firasat bahwa program tersebut akan berhasil mencapai tujuannya.

Kebijakan menurut Dunn (dalam Widiyaka et al., 2013) menegaskan bahwa penilaian, pemeringkatan, dan penilaian sama artinya dengan istilah evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya suatu hal. Evaluasi dapat memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai seberapa baik kinerja kebijakan atau program, yang menunjukkan sejauh mana tujuan telah tercapai.

Selain itu, evaluasi dapat dipahami sebagai cara untuk sampai pada penilaian berdasarkan kegiatan (kualitatif atau kuantitatif) yang dianggap valid, dan kemudian membandingkan hasil aktual program dengan hasil yang diharapkan. Evaluasi harus dapat diandalkan dan didasarkan pada bukti yang dikumpulkan dengan cara yang ketat dan tidak memihak, bahkan ketika evaluasi tersebut melibatkan evaluasi keadaan yang tidak berwujud, yang sulit untuk diukur (Rossi, 1985).

Pembahasan tentang kebijakan publik tentu sangat luas. Hal ini merupakan suatu pilihan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelesaian dari suatu masalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Dye (1999:2) yaitu *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”*. Mustopadidjaja (2003:5) merumuskan lebih operasional lagi, yaitu kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan

tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, negara, dan pembangunan.

Pemerintah harus membuat kebijakan agar dapat memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan warganya. Melaksanakan pembangunan suatu bangsa merupakan salah satu tugas utama pemerintah. Kebijakan pemerintah dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan negara pasti akan mempunyai dampak.

Hasil tersebut mungkin mempunyai dampak positif jika negara dan masyarakat mampu mengatasi masalah-masalah mereka secara efektif dan mencapai tujuan-tujuan mereka, atau mungkin mempunyai dampak negatif jika sebagian besar kepentingan dan tujuan masyarakat tidak tercapai dan negara tidak mampu mewujudkannya kepentingan masyarakat dan negara. Karena dalam melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah memerlukan suatu pengambilan keputusan dan keputusan tersebut haruslah keputusan yang terbaik diantara sekian banyak pilihan yang ada untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan bangsa dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan.

Pada hakikatnya tujuan kebijakan publik adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, maka pengawasan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut efektif dan efisien, serta kemampuannya untuk mencapai tujuan dan menghindari kegagalan.

Menurut Nugroho (2009:535), sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut

evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Berdasarkan pendapat Nugroho diatas, sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu dilakukan pengawasan agar dalam mengimplementasikan kebijakan publik tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai, serta untuk menilai berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan publik perlu dilakukan evaluasi. Tidak semua kebijakan publik setelah diimplementasikan akan berhasil dan begitu juga sebaliknya, tidak semua kebijakan publik gagal dalam implementasinya. Kegagalan tersebut menurut Hogwood dan Gunn dikutip oleh Wahab (1990:47-48) disebabkan oleh *non implementation* (tidak diimplementasikan) dan karena *unsuccessful* (implementasi yang tidak berhasil). Sesuai dengan hal tersebut kegagalan sebuah kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya tidak semata-mata disebabkan karena salah memilih alternatif-alternatif kebijakan publik, akan tetapi dapat disebabkan karena memang tidak pernah diimplementasikan dengan baik

Kebijakan publik telah diberlakukan, namun tidak dilakukan dengan cara yang sejalan dengan tujuan utama kebijakan tersebut, yang menunjukkan bahwa penanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mengetahui tujuannya. Seperti yang telah dikatakan Dye sebelumnya, kebijakan adalah suatu tindakan atau kelambanan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh yang sama dalam penyelesaian masalah. Tidak semua kebijakan yang diambil pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah harus dinilai oleh

sekelompok ahli untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dipertahankan atau ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Winarno (2012:228-229) yang menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan inisiatif kebijakan publik memberikan hasil yang diharapkan.

Dengan kata lain, evaluasi kebijakan adalah proses memperkirakan, menilai, atau mengevaluasi suatu kebijakan untuk melihat apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif atau menghasilkan perubahan yang lebih baik dibandingkan sebelum diterapkan, atau tidak berefek sama sekali. Sebagaimana dikemukakan Anderson (2003:245), evaluasi kebijakan mencakup estimasi, penilaian, atau penilaian suatu kebijakan, termasuk isinya, implementasinya, pencapaian tujuan, dan dampak lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan tersebut.

4. Tujuan Evaluasi

Subarsono (2016:120–122) menyatakan bahwa evaluasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: mengetahui seberapa baik kinerja suatu kebijakan. Sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai dapat dipastikan melalui evaluasi. menilai tingkat efisiensi suatu kebijakan. Kita dapat memastikan biaya dan manfaat suatu kebijakan melalui evaluasi. menghitung tingkat keluaran (hasil) suatu kebijakan. Mengukur jumlah dan kaliber uang yang dikeluarkan atau hasil suatu kebijakan merupakan salah satu tujuan evaluasi.

Mengukur dampak suatu kebijakan. Tujuan evaluasi pada saat ini adalah untuk mengidentifikasi dampak baik dan negatif. untuk menentukan apakah ada anomali. Evaluasi juga berupaya mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan cara membandingkan target dan aspirasi pencapaian target.

Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir

dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Tahap-tahap kebijakan sebagai sebuah proses meliputi input, proses kebijakan, *output*, *outcome*, dan dampak.

Sumber daya mentah yang digunakan sebagai masukan dalam suatu sistem kebijakan disebut sebagai masukan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, tuntutan, dan dukungan masyarakat merupakan contoh dari masukan tersebut. Proses mengubah input menjadi output dilakukan oleh para aktor sistem politik. Perundingan dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan, mungkin sama atau berbeda yang terjadi selama proses konversi ini. *Output* adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, Keluaran sistem kebijakan dapat berupa aturan, pedoman, arahan, layanan, atau program. Sebaliknya, hasil adalah apa yang terjadi sebagai akibat dari penerapan suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Dampak adalah dampak tambahan yang ditimbulkan oleh implementasi suatu kebijakan terhadap masyarakat.

5. Indikator Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, William N. Dunn (2013:610) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator, diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penilaian kebijakan formal dengan jenis evaluasi formatif, sesuai dengan uraian pendekatan evaluasi dan kriteria evaluasi yang telah diberikan sebelumnya. Penilaian ini dilakukan ketika suatu program atau kebijakan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas PKH guna menentukan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Para peneliti mengidentifikasi tujuan program sebagai bagian dari domain

perubahan individu yang terkait dengan tujuan PKH dan mengembangkan indikator efektivitas, kesetaraan, dan daya tanggap untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH
- b) Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
- c) Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil atau menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun peserta
- d) Meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH

6. Pengertian Program Keluarga Harapan

Menurut Jones (1996:295), program adalah sarana yang valid untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa program merupakan perpanjangan dari tahapan yang terlibat dalam mencapai tujuan akhir dengan cara ini. Program pemerintah dalam konteks ini merujuk pada upaya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga keduanya mencakup proyek-proyek tersebut.

Kementerian Sosial Republik Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan. Program yang telah berlangsung sejak tahun 2007 ini bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan dengan meningkatkan sistem pendidikan. Program ini merupakan modifikasi dari Transfer Tunai Bersyarat, sebuah inisiatif perlindungan sosial yang populer. Di negara-negara berkembang yang menggunakannya, program ini dinilai sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya isu kemiskinan kronis. Menteri Sosial dan Pemerintah Daerah secara resmi memperkenalkan PKH di Flores Timur pada tahun 2013.

PKH adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan merupakan sebuah

inisiatif sosial yang menyalurkan bantuan terhadap keluarga miskin (KM) dan telah dinyatakan sebagai penerima manfaat dari PKH. PKH memiliki sasaran yang ditujukan kepada keluarga-keluarga yang hidup dalam kondisi kekurangan dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Keluarga yang ingin menjadi penerima manfaat PKH harus melengkapi persyaratan yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Individu yang termasuk kategori tersebut akan diakui sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH (Kemensos, 2020).

Keluarga penerima manfaat, atau KPM, didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan layanan sosial penting termasuk kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan dukungan. Mereka juga didorong untuk memiliki akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang bersifat berkelanjutan dan merupakan layanan pelengkap.

Harus dipastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), jaminan sosial KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), bantuan Rutilahu pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

7. Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan

Program Keluarga Harapan (PKH) sangat menunjang komitmen bidang pendidikan dalam tanggung jawabnya memenuhi tuntutan pendidikan untuk semua (*education for all*), walaupun implementasi

PKH pendidikan fokusnya bukanlah bagaimana memberi pelayanan pendidikan, tetapi bagaimana caranya memberi bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar anak-anak mereka bisa mengakses layanan pendidikan. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 (sembilan) tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Dalam bidang pendidikan, kewajiban RTSM penerima bantuan PKH yang mempunyai anak usia pendidikan dasar harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a) Anak usia sekolah 6-15 tahun terdaftar di SD dan SMP dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah. Pengecualian diberlakukan apabila sakit dengan keterangan, bencana alam, libur sekolah, transisi dari SD/MI ke SMP/MTs.
- b) RTSM dengan anak usia RTSM dengan anak usia <18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar atau bekerja, dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan atau program penyiapan di rumah singgah, sanggar belajar, dan sebagainya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (85% tatap muka).
- c) Anak dengan kemampuan terbatas (tuna daksa, terbelakang mental atau penyerapan) tidak dibatasi rentang usia (6-15 tahun) sebatas mereka duduk dibangku setara SD/SMP. Komitmen tetap berbasis kehadiran 85%. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan RTSM dapat memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial khususnya pelayanan pendidikan menghilangkan kesenjangan termasuk sosial, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada keluarga sangat miskin.

Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari

penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia.

Menurut Edgar Dale bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan mendasar peneliti menggunakan metode penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:1) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Basri (2014) bahwa yang menjadi fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju kepada elemen manusia, obyek dan institusi, serta hubungan atau interaksi antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami sebuah peristiwa, perilaku atau fenomena. (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah

fokus kajian penelitian atau pokok soal yang diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Frisilia, 2016:40). Yang menjadi fokus penelitian guna mengukur ketercapaian tujuan maka peneliti menentukan indikator efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas dalam menjawab persoalan dari penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu hal penting dalam menunjang keberlangsungan proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada salah satu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berada di Desa Sagu.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Sektor Pendidikan di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur

Permasalahan Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan di Desa Sagu, Kecamatan Adonara mengharuskan pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah di Desa Sagu salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Evaluasi Program Keluarga Harapan yang dikelola oleh desa agar Program Keluarga Harapan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Sebagaimana konsep evaluasi program menurut Dunn (dalam Widiyaka dkk, 2013) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian. Artinya, evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Penelitian ini terfokus pada hasil observasi dan dokumentasi foto untuk menjawab rumusan masalah mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di sektor pendidikan di Desa Sagu. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn, dalam

(Nugroho, 2017) yang mengatakan bahwa dalam evaluasi terdapat beberapa indikator diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Peneliti menentukan indikator efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas yang difokuskan pada identifikasi tujuan program.

Maka berdasarkan hasil penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan diuraikan sebagai berikut:

a) Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas artinya berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya (Dunn, 2003). Efektivitas yang baik dapat dicapai jika memperhatikan keadaan sekarang, memperhatikan keberhasilan, kegagalan, tantangan dan kendala, dan mengkoordinasi pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan data hasil penelitian, sudah ditentukan tujuan dari program ini yakni mengurangi anak putus sekolah. Biaya untuk Program Keluarga Harapan sebesar Rp. 450.000.000 untuk pendidikan anak tingkat SMP/MTS. Program Keluarga Harapan sudah memenuhi beberapa kriteria seperti memperhatikan pembiayaan pendidikan anak di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan di SMPN 1 Adonara belum berjalan sesuai tujuan artinya orang tua siswa penerima bantuan Program Keluarga Harapan belum tepat waktu dalam proses pembayaran uang sekolah dan terkadang siswa atau siswi menunda ujian dikarenakan belum membayar atau menunggak uang sekolah.

Namun dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan ini, masyarakat penerima PKH kurang

memahami akan program tersebut terkadang uang yang diterima selalu salah menggunakan artinya untuk keperluan atau kebutuhan lain. Program PKH di Desa Sagu sudah baik atau berhasil karena adanya program PKH ini banyak anak yang menempuh pendidikan dan mengurangi anak putus sekolah di Desa Sagu.

b) Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan merupakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Artinya berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003). Dimaksud kecukupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Suatu program yang baik harus memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi penerima PKH yaitu ibu hamil maksimal kehamilan kedua (tidak lebih), anak usia dini maksimal dua anak dalam satu keluarga, anak usia sekolah SD maksimal satu anak dalam satu keluarga, anak usia sekolah SMP/MTS maksimal satu anak dalam satu keluarga, lanjut usia atau lansia maksimal satu orang dalam keluarga, dan penyandang disabilitas maksimal satu orang dalam keluarga.

Berdasarkan data hasil penelitian, kecukupan Program Keluarga Harapan sudah memenuhi kriteria namun besaran uang yang diterima untuk anak usia sekolah SMP/MTS sebesar Rp. 450.000 dan terkadang nominal uang yang diterima tidak tepat atau tidak setara karena ada yang menerima uang untuk anak usia sekolah SMP/MTS sebesar Rp.900.000. Kecukupan untuk pembiayaan pendidikan termasuk berhasil akan tetapi masyarakat penerima PKH selalu mengabaikan pembiayaan pendidikan.

c) Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat (Dunn, 2003). Yang termasuk dalam keadilan yaitu akuntabilitas publik, akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan, terkadang kurang merata karena dalam bantuan PKH ini ada masyarakat yang tergolong mampu dalam membayar pendidikan anak malah mendapatkan bantuan PKH tersebut. Sehingga orang tua yang tergolong tidak mampu tidak mendapatkan bantuan PKH yang mengakibatkan anak usia sekolah SMP/MTS tidak menempuh pendidikan, malah membantu orang tuanya mencari nafkah dengan merantau di luar.

Permasalahan orang tua yang tergolong mampu dan mendapatkan bantuan PKH sudah ditangani oleh desa setempat dengan cara menghapus nama yang tergolong mampu, akan tetapi malah mengakibatkan selisih paham antara penerima tersebut. Dengan itu di Desa Sagu pemberi bantuan PKH belum merata.

d) Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu (Duun,2003).

Berdasarkan definisi diatas responsivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah. Preferensi atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, serta mengembangkan program-program

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa respon masyarakat di saat pencairan bantuan PKH maka antusias masyarakat cepat, akan tetapi respon masyarakat penerima PKH di saat melakukan kewajibannya seperti membayar uang pendidikan anak kurang antusias dikarenakan berbagai alasan seperti keperluan adat, kebutuhan hidup dan keperluan lainnya. Maka peneliti menyimpulkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan belum bagus atau belum sesuai dengan program PKH.

2. Faktor Pendukung dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Sektor Pendidikan di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur adalah partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Sagu yang sangat tinggi sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan tepat waktu.

3. Faktor Penghambat Inovasi Sertifikasi Benih Online pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT. PSBTPH) Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur adalah:

- a) Kurang Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Pendidikan

Penerima PKH tentang kewajiban dalam pendidikan anak. Dimana orang tua siswa atau siswi yang penerima PKH

selalu menunda-nunda kewajiban dalam pembayaran pendidikan.

- b) Akibat Kebutuhan Orang Tua yang Berlebihan

Artinya banyak orang tua penerima PKH selalu menyalahgunakan bantuan PKH tersebut seperti urusan adat, *shopping*, jalan-jalan, dan kebutuhan lainnya.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih ada masyarakat dan tatanan pemerintah daerah belum sesuai artinya Program Keluarga Harapan di Desa Sagu belum tepat sasaran dalam penerima program tersebut. Dampak dari PKH ini karena dijalankan dengan responsivitas masyarakat penerima PKH sangat mendukung dan antusias yang sangat tinggi dengan program tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan Desa Sagu sangat berpengaruh positif, karena dimana masyarakat Desa Sagu sudah meningkatkan pendidikan anak dan dapat mengurangi anak putus sekolah.

Faktor pendukung dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Sektor Pendidikan Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur adalah tingginya partisipasi pemerintah desa dan antusiasme masyarakat Desa Sagu sangat mendukung dengan program ini. Sedangkan faktor penghambat dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor pendidikan yaitu kurang kesadaran masyarakat dalam pembayaran pendidikan dan akibat kebutuhan orang tua.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi Program Keluarga Harapan pada sektor pendidikan (studi pada sekolah SMPN 1 Adonara, Desa Sagu, Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur) maka peneliti memberikan saran yaitu:

- a) Dalam melakukan pemerataan tentang penerima PKH harus memperhatikan masyarakat yang tergolong kurang mampu atau yang termasuk dalam kriteria penerima PKH tersebut.
- b) Dalam melakukan pembayaran uang sekolah harus tepat waktu dimana anak siswa atau siswi harus melakukan ujian dengan tepat waktu dan melakukan ujian dengan tenang dan tidak terpekir tentang pembiayaan uang sekolah.
- c) Selalu memberikan dukungan kepada anak usia sekolah agar tidak berhenti sekolah.

REFERENSI

- Agus, R. (2023). Analysis Of The Family Hope Program. *The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST)*, 2(1), 104–116.
- Aini, N. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Garcia, G. D. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Lamandau Tahun 2016. Bimo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Kiwang, A. S. (2018). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kupang. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 31–48.
- Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 65–70.
- Nuraida, R. (2023). Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 228–246.
- Pangenaman, F. N. (2023). Transparansi Pendataan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–7.
- Putri, F. A. (2020). Analisis Perkembangan Seni Kreativitas Siswa Kelas Rendah Muhammadiyah Pajangan 2 Yogyakarta. *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 3(1), 1–9.
- Rusydi, R. (2017). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 17(1), 77–84.
- Vensilia, P., Yohanes, G. T., & Helan, N. A. (2023). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sipi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. *JHO Jurnal Hukum Online*, 1(2), 52–74.
- Vonika, N. (2022). Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Miskin di Kampung Lio Kota Depok). *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 4(1), 76–89.
- Wasitohadi, W. (2014). Hakekat Pendidikan Dalam Perspektif John Dewey Tinjauan Teoritis. *Satya Widya*, 30(1), 49–62.
- Yusrianti, E. (2022). Dampak Sosial Ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(3), 183–190.

